



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pendekatan Kultural Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Melalui Keterlibatan Pemangku Adat dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih

Difa Ghassani¹, Tengku Rika Valentina², Asrinaldi³

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, dfghssni@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@soc.unand.ac.id

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia, asrinaldi@soc.unand.ac.id

Corresponding Author: dfghssni@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the strategies of the Solok City Election Commission in increasing voter participation through cultural collaboration with traditional institutions, particularly LKAAM and Bundo Kanduang, since 2017. Using a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis, the study finds that traditional leaders play a central role in enhancing political literacy due to their strong social legitimacy within Minangkabau communities. Collaboration is reflected in activities such as the Voter Protection Movement (2018), the 2019 Simultaneous Election Outreach, democracy dialogues, mosque-based education, and cultural forums attended by 100–250 participants. LKAAM utilizes networks of penghulu, surau, and customary meetings, while Bundo Kanduang mobilizes women's social networks through religious gatherings and family-based discussions. Findings show an increase in voter turnout from 77.5% (2014) to 86% (2019) and 83.7% (2024), alongside strengthened political literacy delivered through culturally grounded messages. The study concludes that culturally embedded strategies enhance social capital, clarify institutional roles, and constitute a best-practice model for voter education applicable to other regions.*

Keywords: *Solok City Election Commission, voter participation, outreach strategy, traditional leaders, political literacy.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis strategi KPU Kota Solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui kolaborasi dengan pemangku adat, khususnya LKAAM dan Bundo Kanduang, sebagai pendekatan berbasis kearifan lokal sejak 2017. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pemangku adat berperan sentral sebagai penyampai literasi politik yang kredibel karena memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih (2018), Sosialisasi Pemilu Serentak (2019), Dialog Demokrasi, sosialisasi berbasis masjid, serta forum budaya yang secara rutin dihadiri 100–250 peserta. LKAAM memanfaatkan jaringan penghulu, surau, dan pertemuan adat, sementara Bundo Kanduang menggerakkan jaringan sosial perempuan melalui pengajian dan kegiatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih dari 77,5% (2014) menjadi 86% (2019) dan 83,7%

(2024), serta penguatan literasi politik masyarakat melalui pesan politik yang disampaikan dengan bahasa adat dan simbol kultural. Temuan ini menegaskan bahwa strategi berbasis adat memperkuat modal sosial, menciptakan kejelasan peran, dan membentuk model best practice dalam pendidikan pemilih yang dapat direplikasi di daerah lain.

Kata Kunci: KPU Kota Solok, partisipasi pemilih, strategi sosialisasi, pemangku adat, literasi politik.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin serta menentukan arah kebijakan publik secara konstitusional. Namun, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis administrasi, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Di wilayah yang masih kuat memegang nilai-nilai adat seperti Sumatera Barat, partisipasi politik masyarakat sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial dan kultural yang berakar pada sistem adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABSSBK). Dalam konteks ini, pemangku adat seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang memiliki peran signifikan dalam menjembatani tradisi dan praktik demokrasi modern (Nasution, 2020).

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi elektoral di Indonesia. Pemilu yang partisipatif tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga oleh tingkat literasi politik masyarakat. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan pemilih yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yakni membangun kesadaran politik yang rasional dan beretika (Verba, Schlozman, dan Brady, 1995). Dalam konteks lokal strategi pendidikan pemilih perlu disesuaikan dengan karakter sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, KPU Kota Solok menempuh pendekatan kultural melalui sinergi dengan pemangku adat untuk memperkuat partisipasi politik berbasis kearifan lokal. Kota Solok merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang masih kuat mempertahankan sistem sosial berbasis adat Minangkabau. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan organisasi Bundo Kanduang memiliki posisi sosial yang penting dalam mengarahkan nilai-nilai moral dan perilaku sosial masyarakat. Pemangku adat, terutama para *penghulu* dan *bundo kanduang*, tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai adat, tetapi juga sebagai komunikator sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat (Navis, 1984). Oleh sebab itu, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosialisasi pemilu menjadi langkah strategis dalam menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini kurang terlibat dalam politik formal.

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya kolaborasi antara lembaga formal dan struktur sosial tradisional dalam memperkuat demokrasi lokal. Penelitian Auerbach (2022) menunjukkan bahwa otoritas tradisional di tingkat lokal dapat berfungsi sebagai *network bridge* antara negara dan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintahan melalui pendekatan berbasis kepercayaan dan budaya. Sementara itu, studi oleh Aldrich dan Meyer (2015) menegaskan bahwa jaringan sosial lokal menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial dan partisipasi kolektif dalam konteks politik dan bencana. Di Indonesia, penelitian Nurdin (2021) tentang peran tokoh adat di Kabupaten Agam juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku adat dalam pendidikan politik berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa strategi berbasis kearifan lokal relevan untuk memperkuat literasi dan partisipasi politik masyarakat.

Dalam konteks teori, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, teori peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Khan dan Katz (1964), yang menekankan pentingnya *role consensus* atau kesepahaman bersama mengenai perilaku yang pantas sesuai dengan posisi sosial tertentu. Dalam kasus ini, pemangku adat di Kota Solok memahami perannya sebagai penjaga moral publik yang netral secara politik, tetapi tetap aktif memberikan pendidikan politik berbasis nilai adat. Sementara KPU berperan sebagai fasilitator demokrasi yang mengintegrasikan pendekatan budaya ke dalam strategi sosialisasi pemilu. Kedua, penelitian ini juga berlandaskan pada teori jaringan sosial yang dikemukakan oleh Coleman (1990), di mana *network density* tingkat keterhubungan antaraktor dalam jaringan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap penyebaran norma dan arus informasi politik. Jaringan sosial yang rapat antara KPU, LKAAM, dan Bundo Kandung memungkinkan proses komunikasi politik berlangsung efektif dan dipercaya masyarakat.

Sinergi ini tampak melalui kegiatan kolaboratif antara KPU Kota Solok dan lembaga adat selama periode 2023–2024, seperti *dialog adat dan politik santun*, *panggung pidato adat bertema pemilu berintegritas*, serta *forum rembuk kultural* menjelang masa kampanye. Berdasarkan data KPU Kota Solok (2024), terdapat sedikitnya lima kegiatan yang melibatkan lembaga adat dengan tingkat partisipasi masyarakat rata-rata mencapai 250 orang per kegiatan. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai adat seperti *bajanjang naiak batanggo turun* dan *saciok bak ayam*, *sadanciang bak basi* digunakan sebagai metafora untuk menanamkan pesan pentingnya musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menggunakan hak pilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi sinergi antara KPU Kota Solok dan pemangku adat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat berbasis kearifan lokal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model pendidikan pemilih berbasis budaya dan kontribusi praktis bagi lembaga penyelenggara pemilu di daerah lain dalam merancang strategi sosialisasi yang kontekstual dan efektif. *State of the art* dari penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan kajian tentang kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan struktur sosial tradisional sebagai mekanisme peningkatan partisipasi politik. Penelitian terdahulu umumnya memisahkan peran lembaga negara dan lembaga adat, sedangkan studi ini menyoroti interaksi keduanya dalam kerangka komunikasi politik kultural. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengamati hasil partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga menelaah mekanisme sosial yang menopang keberhasilan kolaborasi berbasis nilai lokal. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada model *sinergi kultural elektoral* yang dikembangkan KPU Kota Solok dengan pemangku adat sebagai bentuk inovasi kelembagaan dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi KPU di mata masyarakat adat, tetapi juga memperluas makna pendidikan politik dari sekadar sosialisasi formal menjadi praktik pembelajaran sosial berbasis budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan strategi partisipasi politik berbasis kearifan lokal dan kontribusi praktis bagi penguatan kelembagaan demokrasi di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode yang memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks dunia nyata dengan fokus pada kekhasan dan keunikan kasus yang dipelajari tanpa berupaya untuk merepresentasikan kasus lain. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara komprehensif dan kontekstual dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen (Wahyuningsih, 2013). Penarikan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan guna memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai konteks. Data sekunder

seperti skripsi, tesis, jurnal, dan buku juga digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat landasan teori dan proses analisis data (Ilhami dkk., 2020). Penggunaan berbagai sumber dan teknik data ini juga berfungsi sebagai triangulasi untuk memperkuat validitas temuan penelitian. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang strategi pemangku adat dalam mendorong kesuksesan pemilu di Sumatera Barat serta bagaimana nilai-nilai tradisi dan demokrasi dapat disinergikan melalui peran pemangku adat (Rahardjo, 2018). Proses analisis dilakukan secara sistematis mengikuti langkah-langkah dalam desain studi kasus, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil yang valid dan bermakna secara ilmiah (Yin, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangku adat di Kota Solok, khususnya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang, memainkan peran sentral dalam meningkatkan literasi politik masyarakat melalui pendekatan berbasis adat. Sebagai figur yang berpengaruh dalam sistem sosial Minangkabau, mereka memiliki legitimasi moral dan sosial untuk menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat (Coleman, 1990). Dalam konteks ini, pemangku adat tidak hanya berfungsi menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesadaran politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dikaitkan dengan nilai-nilai adat dan agama. Kolaborasi antara KPU Kota Solok dan lembaga adat ini terbukti meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilih meningkat dari 77,5% pada Pemilu 2014 menjadi 86% pada Pemilu 2019 dan 83,7% pada Pemilu 2024, dengan jumlah pemilih perempuan mencapai 23.832 orang. Peningkatan ini berkorelasi dengan intensitas kegiatan sosialisasi berbasis adat yang dilakukan secara kolaboratif (KPU Kota Solok, 2024). Kegiatan tersebut antara lain *Gerakan Melindungi Hak Pilih* (2018), *Sosialisasi Pemilu Serentak* (2019), *Dialog Demokrasi dan Pemilu* (2019), hingga *Sosialisasi Pemilu 2024* melalui forum masjid dan kegiatan budaya. Dalam kegiatan ini, KPU berperan sebagai fasilitator, sementara LKAAM dan Bundo Kanduang menjadi penyampai utama materi politik melalui bahasa dan simbol lokal.

Pendekatan kultural ini dinilai efektif karena memanfaatkan jaringan sosial yang telah terbentuk kuat di masyarakat. LKAAM memanfaatkan struktur surau, masjid, dan jaringan penghulu untuk menyebarkan informasi politik, sedangkan Bundo Kanduang menggunakan relasi sosial antarperempuan, majelis taklim, dan kegiatan rumah tangga untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Pola ini memperlihatkan adanya *network density* atau kepadatan jaringan sosial yang tinggi, yang memungkinkan arus informasi politik mengalir secara horizontal dan diterima dengan lebih baik oleh masyarakat (Auerbach, 2022). Selain kegiatan bersama KPU, LKAAM dan Bundo Kanduang juga secara mandiri melaksanakan kegiatan literasi politik seperti *Sosialisasi Sukseskan Pemilu 2019*, *Penyuluhan Politik Uang dan Pemilu 2024*, serta *Sosialisasi Pemilu melalui Khotbah Jumat*. Aktivitas ini menunjukkan adanya kesadaran politik kolektif dan inisiatif sosial dari lembaga adat dalam membangun partisipasi politik berbasis nilai lokal. Seperti diungkapkan oleh Ketua LKAAM, Muhammad Rusli, kegiatan sosialisasi sering dilakukan dengan bahasa sehari-hari dan contoh konkret agar lebih mudah dipahami masyarakat, sementara dana kegiatan sebagian besar berasal dari alokasi lembaga adat dan dukungan pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori peran (Khan & Katz, 1964), kolaborasi antara KPU dan pemangku adat mencerminkan adanya *role consensus*, yaitu kesepahaman mengenai batasan dan fungsi sosial masing-masing aktor. Pemangku adat tetap menjaga netralitas politik, namun aktif dalam memberikan pendidikan politik yang beretika. Dari sisi teori jaringan sosial (Coleman, 1990), hubungan antara KPU, LKAAM, dan Bundo Kanduang membentuk struktur *bonding* dan *bridging social capital* (Putnam, 2000) di mana solidaritas lokal diperkuat sekaligus terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi modern. Kehadiran pemangku adat dalam literasi politik terbukti meningkatkan efektivitas pesan politik, terutama karena tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat jauh lebih tinggi dibanding terhadap lembaga formal. Hal ini sesuai dengan temuan *Aldrich dan Meyer (2015)* bahwa keberhasilan partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh modal sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi. Dengan demikian, strategi kolaboratif antara KPU dan lembaga adat di Kota Solok dapat dikategorikan sebagai *best practice* dalam mengembangkan model literasi politik berbasis kearifan lokal.

Tabel 1. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Oleh LKAAM, *Bundo Kandung* beserta KPU Kota Solok Tahun 2018-2024

No	Nama Kegiatan	Hari/Tanggal	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pilih dan Sosialisasi Tahapan Kampanye	Rabu/17-10-2018	Gedung Kubung 13	156 Peserta
2.	Kegiatan Tentang Pemilu Serentak Oleh KPU Kota Solok, LKAAM dan <i>Bundo Kandung</i>	Sabtu/16-2-2019	Mesjid Sikarah Lubuk	200 Peserta
3.	Kegiatan Pemilu Serentak 2019	Sabtu/9-3-2019	Mesjid Sikarah Lubuk	197 Peserta
4.	Penyuluhan Kepada Masyarakat dalam Menghadapi Pilpres dan Pileg di Kota Solok	Kmis/21-3-2019	Aula SMPN 5 Kota Solok	140 Peserta
5.	Kegiatan Sosialisasi Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019	Kamis/11-4-2019	Pelantaran Parkir Lapangan Merdeka	15 Peserta
6.	Kegiatan Pengawasan Anti Politik Uang dalam Pemilu Serta <i>checking</i> Persiapan Pelaksanaan Pemilu	Jumat/12-4-2019	Halaman Balai Kota	250 Peserta
7.	Sosialisasi dalam Mengsukseskan Pemilu 2019	Minggu/14-4-2019	Lapangan Polres Kota Solok	239 Peserta
8.	Apa itu demokrasi dan Pemilu	Jumat//14-6-2019	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	67 Peserta
9.	Politik Uang dan Menyukkseskan Pemilu 2024	Minggu/22-5-2022	Mesjid Sikarah Lubuk	25 Peserta
10.	Siaga Penanganan Satu Tahun Menuju Pemilu	Selasa/ 14-02-2023	Hotel Tofina	-
11.	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian dan Penyusunan Daftar Pemilu Di Lokasi	Sabtu/ 25-02-2023	D'Relazion	-
12.	Kegiatan gabungan KPU, LKAAM, <i>Bundo Kandung</i> dan KAN membahas materi Pemilu dan demokrasi kepada masyarakat	Selasa/ 11-04-2023	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	61 Peserta
13.	Rapat Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS	Rabu/ 5 -04-2023	KPU Kota Solok	-
14.	Sosialisasi Fasilitas Permasalahan Pasca Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Kamis/15-06-2023	D'Relazion	
15.	FGD Tahapan Pemilu	Jumat/23-06-2023	Aula Ceredek Hotel	
16.	Sosialisasi Pemilu 2024, memberikan literasi tentang pemilu	Jumat/17-11-2023	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	Peserta yang hadir yaitu peserta yang sholat jum'at di masjid tersebut
17.	Sosialisasi Tahapan Kampanye Pemilu	Sabtu/20-01-2024	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	31 Peserta
18.	Sosialisasi Tahapan Pemilu	Minggu/19-11-	D'Relazion Café	47 Peserta

2024							
19.	Sosialisasi kepada Disabilitas	Tahapan Komunitas	Pemilu Pemilih	Senin/20-11-2024	Solok Hotel Syariah	Premier	43 Peserta
20.	Sosialisasi Serentak	Tahapan	Pemilu	Sabtu/25-11-2024	Caradek Kota Solok	Hotel	56 Peserta

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2025

Berdasarkan data kegiatan literasi politik yang dilakukan di Kota Solok sejak 2018 hingga 2024, terlihat bahwa kolaborasi antara KPU Kota Solok dan lembaga adat seperti LKAAM serta *bundo kanduang* memainkan peran signifikan dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dalam kegiatan tertentu KPU bertindak sebagai fasilitator atau penyelenggara formal, sementara materi dan pendekatan edukatif secara langsung disampaikan oleh pemangku adat. Model ini menunjukkan adanya pembagian peran yang efektif dan saling melengkapi antara lembaga negara dan lembaga adat. Dalam setiap acara adat tersebut, para *ninik mamak* menyisipkan pesan moral dan politik tentang pentingnya memilih pemimpin berintegritas. Selain itu, *bundo kanduang* di Kota Solok memiliki peran unik dalam menyebarkan literasi politik melalui jaringan sosial perempuan. Mereka mengadakan pengajian dan diskusi keluarga untuk menjelaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam pemilu. Dengan demikian, pemangku adat di Kota Solok tidak hanya berperan simbolik, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang menjembatani nilai tradisi dan demokrasi.

Perilaku Peran Dalam Meningkatkan Literasi Politik

Peran pemangku adat di Kota Solok, khususnya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang, menunjukkan perilaku sosial yang adaptif dan partisipatif dalam peningkatan literasi politik masyarakat. Berdasarkan teori peran Khan dan Katz, perilaku peran mencerminkan pola tindakan yang sesuai dengan harapan sosial dan posisi seseorang dalam sistem sosial (Khan & Katz, 1978). Dalam konteks ini, pemangku adat berperan sebagai agen penyampai informasi politik yang kredibel dan berakar pada nilai-nilai kultural Minangkabau. Keterlibatan LKAAM tercermin dari aktivitas rutin mereka dalam kegiatan sosialisasi berbasis adat yang diinisiasi baik oleh lembaga adat maupun oleh KPU Kota Solok. Berdasarkan data lapangan, LKAAM menggelar forum adat, panggung pidato adat, serta pertemuan silek dan surau di setiap kelurahan sebanyak 1–2 kali per bulan, dan meningkat menjadi 3–4 kali menjelang Pemilu. Kegiatan tersebut rata-rata dihadiri oleh 200–250 peserta, mencakup *niniak mamak*, pemuda, dan masyarakat umum (Wawancara dengan Muhammad Rusli, Ketua LKAAM, 20 Juni 2025). Dalam forum tersebut, pesan-pesan politik seperti bahaya politik uang, pentingnya partisipasi, dan etika berdemokrasi disampaikan menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab di telinga masyarakat.

Selain kegiatan tatap muka, LKAAM juga berkolaborasi dengan KPU melalui media digital seperti podcast dan siaran langsung (live streaming) yang membahas isu kepemiluan dan demokrasi lokal pada tahun 2019. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua LKAAM dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai narasumber utama (Dokumentasi KPU Kota Solok, 2019). Bentuk partisipasi ini memperlihatkan bahwa lembaga adat tidak hanya berperan dalam konteks tradisional, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Sinergi antara KPU dan pemangku adat semakin nyata dalam berbagai kegiatan sosialisasi kepemiluan seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih dan Sosialisasi Tahapan Kampanye (17 Oktober 2018), Sosialisasi Pemilu Serentak (16 Februari 2019), hingga Simulasi Pemungutan Suara (11 April 2019). Dalam kegiatan tersebut, KPU bertindak sebagai fasilitator teknis, sementara materi disampaikan langsung oleh LKAAM menggunakan pendekatan adat (Wawancara dengan Asraf Danil, Ketua KPU Kota Solok, 15 Juni 2025). Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena masyarakat lebih mempercayai tokoh adat dibandingkan pejabat formal. Berikut beberapa dokumentasi LKAAM, *bundo kanduang*

bersama KPU melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan literasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat menjelang pemilu:



Gambar 1 Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok pada tanggal 15 Juli 2024.



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024



Gambar 3 Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Kepada Komunitas Disabilitas se Kota Solok.

Sumber: Data primer, tahun 2025

Kegiatan literasi politik juga dilakukan oleh Bundo Kandung, yang berperan penting dalam membentuk jaringan literasi politik berbasis perempuan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bundo Kandung Kota Solok, Sitta Novembra, lembaga ini aktif melakukan sosialisasi ke rumah warga, kegiatan pengajian, dan pelatihan kader perempuan yang dilakukan secara berkala di seluruh kelurahan (Wawancara, 26 Juni 2024). Setiap kegiatan diikuti oleh sekitar 100–200 peserta perempuan, dengan dukungan fasilitasi materi dari KPU. Sebelum turun ke lapangan, anggota Bundo Kandung mengikuti pembekalan dari KPU Kota

Solok agar penyampaian pesan politik tetap netral dan informatif (Dokumentasi KPU, 2019). Selain kegiatan bersama KPU, terdapat pula inisiatif murni dari LKAAM dan Bundo Kanduang, seperti Dialog Demokrasi di Masjid Raya Lubuk Sikarah (14 Juni 2019), Penyuluhan Politik Uang (22 Mei 2022), dan Sosialisasi Pemilu 2024 melalui Khotbah Jumat (17 November 2023). Pada kegiatan ini, pemangku adat memanfaatkan forum religius dan sosial sebagai media penyebaran literasi politik berbasis nilai adat (Dokumentasi LKAAM Kota Solok, 2023). Strategi ini terbukti efektif karena pesan politik dikaitkan dengan nilai moral dan kultural yang relevan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dari perspektif teori peran, aktivitas yang dilakukan oleh LKAAM dan Bundo Kanduang mencerminkan role behavior yang diharapkan masyarakat, di mana aktor menjalankan fungsi tradisionalnya namun tetap beradaptasi dengan kebutuhan sosial modern (Khan & Katz, 1978). Hal ini juga sejalan dengan temuan Matsiliza (2022) yang menegaskan bahwa kepemimpinan tradisional berkontribusi besar dalam memperkuat partisipasi demokratis di tingkat lokal. Data partisipasi Pemilu menunjukkan hasil konkret dari peran tersebut. Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih di Kota Solok sebesar 77,5%, meningkat menjadi 86% (40.779 dari 47.418 DPT) pada Pemilu 2019. Peningkatan juga terjadi pada pemilih perempuan, dari 23.180 (2014) menjadi 23.861 (2019), dan mencapai 23.832 pada Pemilu 2024 (Data KPU Kota Solok, 2024). Peningkatan ini berbanding lurus dengan intensitas kegiatan sosialisasi berbasis adat yang dilakukan oleh LKAAM dan Bundo Kanduang dalam kurun waktu 2018–2024. Secara sosiologis, kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat menjadi modal sosial (*social capital*) yang memperkuat efektivitas literasi politik. Pesan yang disampaikan oleh tokoh adat cenderung lebih diterima karena disampaikan melalui jaringan sosial berbasis kedekatan emosional, bukan melalui mekanisme birokratis. Hal ini sesuai dengan pandangan Coleman (1990) yang menyatakan bahwa jaringan sosial yang dilandasi kepercayaan mampu memperkuat arus informasi dan koordinasi sosial dalam masyarakat.

Kejelasan Peran

Kejelasan peran (*role clarity*) antara KPU Kota Solok dan pemangku adat LKAAM serta Bundo Kanduang menjadi faktor penentu dalam efektivitas kegiatan literasi politik. Mengacu pada teori peran Katz dan Kahn, kejelasan peran terbentuk ketika aktor memahami batas, fungsi, dan ekspektasi sosial yang dilekatkan padanya (Katz & Kahn, 1978). Dalam konteks Kota Solok, pemangku adat tidak hanya memainkan fungsi kultural, tetapi juga menjalankan peran baru sebagai agen sosialisasi politik yang secara eksplisit dikomunikasikan oleh KPU dalam setiap rapat koordinasi. Dalam praktiknya, KPU berperan sebagai lembaga otoritatif yang menyediakan informasi resmi mengenai pemilihan, sementara LKAAM dan Bundo Kanduang berfungsi sebagai *cultural brokers* yang meneruskan pesan tersebut melalui forum adat yang lebih akrab bagi masyarakat. Masyarakat Kota Solok mengonfirmasi bahwa mereka mendapatkan informasi pemilu melalui kegiatan adat, pertemuan ninik mamak, serta acara yang melibatkan pemangku adat. Seperti disampaikan Khairani, warga Kota Solok, informasi mengenai kegiatan KPU banyak disebarkan melalui pertemuan LKAAM yang ia hadiri (Wawancara, 2025). Temuan serupa diungkapkan Novarizal, bahwa LKAAM dan Bundo Kanduang menjadi penyampai informasi politik yang aktif di luar kegiatan resmi KPU (Wawancara, 2025).

Dari sisi kelembagaan, LKAAM memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Pertemuan gabungan lembaga yang mereka selenggarakan setiap tahun—dihadiri sekitar 200 peserta—menjadi ruang efektif untuk menghadirkan KPU dan memperluas jangkauan literasi politik. Ketua LKAAM, Muhammad Rusli, menegaskan bahwa lembaganya secara rutin menyampaikan pesan partisipasi pemilu dan mengajak masyarakat hadir ke TPS dalam setiap forum besar (Wawancara, 2025). Pola kerja yang konsisten ini memenuhi indikator kejelasan peran menurut Katz dan Kahn, di mana aktor memahami apa, kapan, dan bagaimana tugas dilaksanakan. Kolaborasi ini juga sejalan

dengan temuan penelitian Brierley (2020) bahwa pemimpin adat di berbagai negara berkembang memiliki *trust capital* yang kuat sehingga keterlibatannya meningkatkan legitimasi proses demokrasi. Arriola, Choi dan Gichohi (2021) menambahkan bahwa dukungan simbolik tokoh tradisional dapat mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Integrasi nilai adat dengan sistem elektoral—aspek yang juga dibahas Kaneko (2018)—terlihat jelas dalam model kerja sama Solok yang memanfaatkan otoritas moral pemangku adat sebagai bagian dari *bridging social capital*.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun peran pemangku adat tidak diikat oleh perjanjian tertulis, komunikasi yang intens dan rutinitas pelibatan membuat batas tugas tetap jelas. KPU tidak memberikan rincian peran dalam bentuk formal, namun arahan lisan, pelatihan, serta undangan rapat rutin menjadikan pemangku adat memahami ekspektasi perannya tanpa menimbulkan *role ambiguity*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan PLT Sekretaris KPU, Edi Ewardi, bahwa pola kerja sama berjalan melalui komunikasi informal yang terjaga (Wawancara, 2025). Dalam konteks Bundo Kandung, peran mereka mengalami perluasan dari penjaga adat ke aktor edukasi politik, khususnya bagi kelompok perempuan. Ketua Bundo Kandung, Sitta Novembra, menjelaskan bahwa selain mengatur urusan adat, mereka kini aktif melakukan sosialisasi atas permintaan KPU dan memberikan literasi politik kepada masyarakat (Wawancara, 2025). Keterlibatan ini dipandang penting karena perempuan seringkali berada pada posisi marginal dalam proses politik, sehingga pendekatan kultural yang dilakukan menjadi strategi efektif memperluas basis literasi politik.

Pada 2019, KPU bahkan membentuk kelompok Bundo Kandung tingkat kelurahan sebagai mitra sosialisasi pemilu. Meskipun tidak terdapat MoU formal, tugas yang diberikan melakukan sosialisasi, menghadiri rapat, dan menyampaikan materi kepemiluan dikomunikasikan secara jelas sehingga tidak memunculkan konflik peran. Dengan demikian, perluasan *role set* Bundo Kandung berlangsung tanpa menimbulkan ketegangan antara peran adat dan peran politik, sesuai kerangka teori Katz dan Kahn. Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara aktor negara (KPU) dan aktor adat (LKAAM dan Bundo Kandung) membentuk pola kolaborasi yang stabil dan produktif. Kejelasan peran, legitimasi kultural, serta frekuensi interaksi menjadi fondasi yang memperkuat efektivitas kegiatan literasi politik di Kota Solok. Kondisi ini sesuai dengan gagasan Coleman (1990) mengenai modal sosial, di mana jaringan sosial yang kuat memperlancar arus informasi dan memperkuat kepatuhan terhadap norma politik. Dengan demikian, pemangku adat menjadi *best practice* dalam penguatan literasi politik berbasis kearifan lokal, yang dapat direplikasi di daerah lain.

Ekspektasi Peran

Dalam perspektif teori peran Katz dan Kahn, ekspektasi peran (*role expectation*) muncul dari tuntutan sosial yang diberikan aktor lain dalam sistem. Ekspektasi ini mengarahkan bagaimana individu atau lembaga bertindak sesuai norma, nilai, dan kewajiban yang dilekatkan pada posisi sosialnya. Dalam konteks Kota Solok, LKAAM dan Bundo Kandung menempati posisi kultural yang memiliki legitimasi tinggi, sehingga ekspektasi peran mereka meluas dari fungsi adat menuju fungsi sosial-politik sebagai penyampai pesan demokrasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perluasan ini diterima oleh kedua lembaga adat karena dianggap selaras dengan tugas mengayomi masyarakat. Ekspektasi terhadap LKAAM terutama datang dari KPU Kota Solok, pemerintah daerah, dan masyarakat. KPU melihat LKAAM sebagai *role occupant* yang dekat dengan masyarakat dan rutin menyelenggarakan pertemuan adat, sehingga dinilai sebagai saluran efektif dalam menyampaikan pesan kepemiluan. Hal ini terlihat dari penjelasan ketua LKAAM, Muhammad Rusli, yang menyatakan bahwa KPU berharap lembaga adat mengajak masyarakat ke TPS dan menyampaikan literasi politik melalui forum rutin yang mereka adakan (Wawancara, 2025).

Posisi ini memperlihatkan bahwa KPU berperan sebagai *role sender* yang menetapkan harapan terhadap peran LKAAM sebagai penghubung antara institusi formal dan masyarakat.

Sejalan dengan teori Katz dan Kahn, ekspektasi ini terbentuk karena adanya struktur sosial yang memposisikan LKAAM sebagai figur otoritatif yang memiliki *trust capital*. Penelitian Muriaas menemukan pola serupa pada pemimpin tradisional di Malawi yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik karena legitimasi sosial yang mereka miliki.¹ Temuan ini sejalan dengan Brierley yang menegaskan bahwa keterlibatan pemimpin adat dalam sosialisasi politik meningkatkan kredibilitas proses elektoral.² Dalam konteks Solok, legitimasi adat tersebut memudahkan LKAAM dalam mengintegrasikan pesan demokrasi ke dalam forum adat, sehingga ekspektasi peran yang diarahkan kepada lembaga adat dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik peran. Ekspektasi peran dari pemerintah daerah terhadap LKAAM bersifat ganda: menjaga nilai adat dan memberikan legitimasi sosial bagi program pemerintah. Harapan masyarakat pun bersifat normatif, menempatkan LKAAM sebagai pengayom yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dengan demikian, ekspektasi peran terhadap LKAAM menunjukkan bahwa lembaga adat diposisikan sebagai jembatan yang mengaitkan otoritas formal dengan basis sosial melalui pendekatan kultural yang lebih diterima masyarakat.

Ekspektasi peran terhadap Bundo Kanduang juga berakar pada legitimasi moral dan simbolik yang melekat pada figur perempuan adat. Kedudukannya sebagai teladan sosial membuat lembaga ini ditempatkan oleh KPU sebagai aktor strategis dalam menjangkau pemilih perempuan. Ketua Bundo Kanduang, Sitta Novembra, menyatakan bahwa KPU memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat, dan kepercayaan tersebut berangkat dari harapan agar Bundo Kanduang mampu menjaga serta melaksanakan amanah tersebut (Wawancara, 2025). Bentuk ekspektasi ini menunjukkan adanya *gendered role expectation*, di mana peran-peran kultural perempuan digunakan untuk memperluas jangkauan literasi politik berbasis keluarga dan komunitas. Secara teoretis, hal ini selaras dengan penelitian Muriaas, Wang, dan Rakner yang menunjukkan bahwa otoritas tradisional perempuan dapat berfungsi sebagai *moral brokers* dalam memperkuat advokasi politik perempuan. Dalam konteks Solok, Bundo Kanduang tidak hanya menjaga nilai adat, tetapi juga menginternalisasikan pesan-pesan demokrasi, menolak politik uang, dan mendorong keterlibatan perempuan dalam Pemilu. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan Bundo Kanduang sebagai figur yang mampu memberikan pemahaman politik yang sehat melalui pendekatan interpersonal. Ekspektasi peran terhadap LKAAM dan Bundo Kanduang memperlihatkan bahwa keduanya dipandang sebagai aktor kultural yang mampu memperkuat literasi politik berbasis kedekatan sosial. KPU menaruh ekspektasi agar keduanya menjadi saluran efektif dalam menyampaikan informasi Pemilu, pemerintah daerah menempatkan mereka sebagai pemberi legitimasi sosial, sementara masyarakat menuntut agar mereka tetap menjaga marwah adat sekaligus adaptif terhadap kebutuhan demokrasi modern. Dengan demikian, ekspektasi peran kedua lembaga adat ini merupakan bentuk pengakuan kolektif terhadap signifikansi mereka dalam memperkuat budaya politik deliberatif di Kota Solok.

KESIMPULAN

Strategi KPU Kota Solok dalam mendorong partisipasi pemilih sejak 2017 menunjukkan efektivitas yang kuat ketika dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif dengan pemangku adat, khususnya LKAAM dan Bundo Kanduang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku adat mampu memperkuat kualitas sosialisasi pemilu karena pesan-pesan demokrasi disampaikan melalui figur yang memiliki legitimasi sosial, jaringan kultural, serta kedekatan dengan struktur komunitas Minangkabau. Strategi ini terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak pilih, alur teknis pemilu, dan urgensi partisipasi politik, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan

partisipasi pemilih pada beberapa periode pemilu terakhir. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi bagaimana strategi berbasis adat dapat memperluas jangkauan pendidikan pemilih dan memperkuat literasi politik masyarakat.

Secara keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi kebijakan publik dan ilmu sosial terapan, khususnya melalui penegasan bahwa integrasi kearifan lokal dapat menjadi perbaikan strategis dalam model pendidikan pemilih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain institusional modern, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pemilu untuk memanfaatkan modal sosial dan struktur budaya yang telah lama berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini menguatkan pemahaman bahwa sinergi antara institusi formal dan otoritas tradisional dapat menjadi inovasi yang relevan untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269.
- Anderson, B. (2004). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Arriola, L. R., Choi, D. D., & Gichohi, P. (2021). Traditional leaders and electoral politics. *Comparative Political Studies*, 54(2), 1–32.
- Auerbach, A. M. (2022). Traditional authority and the local state: Networks, power, and governance in India. *World Politics*, 74(4), 597–638.
- Biddle, B. J. (1986). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. Academic Press.
- Brierley, S. (2020). Chiefs and democratic participation in Africa. *American Political Science Review*, 114(1), 1–20.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Dokumentasi KPU Kota Solok. (2019–2024). *Laporan sosialisasi dan partisipasi pemilih*. KPU Kota Solok.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Handayani. (2022). Peran Bundo Kanduang dalam mengarahkan perilaku politik perempuan Minangkabau. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(3), 112–127.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2020). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469.
- Kaneko, Y. (2018). Local elites and democratic governance in Southeast Asia. *Journal of Asian Studies*, 77(4), 1123–1145.
- Kartini, T. (2020). Social structure and voter decision-making in rural communities. *Journal of Rural Studies*, 78, 334–343.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The social psychology of organizations*. Wiley.
- Khan, R. L., & Katz, D. (1964). *The social psychology of organizations*. Wiley.
- KPU Kota Solok. (2024). *Laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tahun 2023–2024*. KPU Kota Solok.
- KPU Kota Solok. (2024). *Laporan kegiatan sosialisasi dan partisipasi pemilih tahun 2018–2024*. KPU Kota Solok.
- Kristiyanto, E. (2019). Local political institutions and democratic quality in Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 24(1), 45–60.
- Matsiliza, N. (2022). Traditional leadership and democratic governance in South Africa. *African Journal of Public Affairs*, 11(2), 55–70.
- Muriaas, R. L. (2019). Traditional authorities and political awareness in Malawi. *Journal of Modern African Studies*.

- Muriaas, R. L., Wang, V., & Rakner, L. (2020). Female chiefs and democratic empowerment. *African Affairs*.
- Nasution, S. (2010). Peran adat dalam proses demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 99–115.
- Nasution, S. (2020). Strategi pemangku adat dalam menjembatani tradisi dan demokrasi di Sumatera Barat. *Jurnal Kebudayaan dan Politik*, 15(1), 66–82.
- Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahardjo, M. (2018). Desain penelitian studi kasus. *Jurnal Arjuna*, 3(1), 245–254.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Syafrial. (2021). Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 45–60.
- Wahyuningsih, P. (2013). View of penyusunan studi kasus. *Jurnal Kajian Ilmu*.
- Wawancara dengan Asraf Danil, Ketua KPU Kota Solok (2013–2023). (15 Juni 2025).
- Wawancara dengan Muhammad Rusli, Ketua LKAAM Kota Solok. (20 Juni 2025).
- Wawancara dengan Sitta Novembra, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok. (26 Juni 2025).
- Wawancara Lapangan. (2025). Khairani, Novarizal, Tomi Farto, Muhammad Rusli, Dasril, Yance Gafar, Edi Ewardi, Sitta Novembra, & Ida Ramli. Kota Solok.